

REKONSTRUKSI EVALUASI PENDIDIKAN MORAL MENUJU HARMONI SOSIAL

Ulil Hidayah¹

¹ STAI Muhammadiyah Probolinggo, Probolinggo
Email: Permata_ulya@yahoo.co.id

Abstract

Various efforts have been made by the government to achieve the expected educational objectives. Starting from the centralization policy that changed into decentralization and then democratization to curriculum changes that are considered able to improve the quality and quality of education in Indonesia as a whole. However, the reality of educational output that occurs today is still covered by increasingly complex problems. Of all the problems of education, social disharmonization is the most striking picture indicating that education fails to form a civilized human being. This article seeks to review the evaluation of moral education on the subjects of Islamic Education and Civic Education. Both of these subjects are considered the most responsible for the ethics of thinking and behaving of educated human beings. According to the curriculum applied today the plans and learning process has been running well, but need to be re-constructed in the evaluation of student learning outcomes. In the hope that the main judgment is not just from the cognitive domain as a complete learning in the classroom, but more than that it is a real and permanent affective and psychomotor assessment in the student until he grows in the midst of a harmonious social society.

Keywords: *Reconstruction, Evaluation, Moral Education, Social Harmony*

Pendahuluan

Secara universal sistem Pendidikan Nasional memiliki peranan yang signifikan terhadap dinamika perjalanan bangsa Indonesia (Baharun, 2017a). Hal ini dapat dilihat dari fenomena-fenomena kerusuhan yang mewarnai negeri ini. Banyak diantaranya pemicu terjadi konflik dalam negeri diakibatkan oleh perbedaan yang dimaknai sebagai garis runcing pemisah antara kelompok satu dan lainnya, baik itu perbedaan agama, suku, budaya bahkan yang lebih fenomenal akhir-akhir ini perseteruan antara kelompok-kelompok yang memiliki paham ideology yang berbeda (Fauzi, 2017), sehingga bendera politik identitas mulai menjadi isu yang sensitif ketika dikibarkan di wilayah tertentu atau menjadi benturan keras yang memicu saling merasa benar dan saling menyalahkan antar golongan yang berbeda sudut pandang pemahaman. Politik identitas dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa (Ahmad Syafi'I Ma'arif, 2012). Sementara isu-isu terkait politik identitas di Indonesia antara lain adalah munculnya kepentingan *local* seperti tentang keadilan dan pembangunan daerah yang tidak merata serta adanya perbedaan agama dan *ideology* yang dirasa tidak menjamin antar golongan dapat hidup tenang berdampingan. (Mundiri & Zahra, 2017)

Sejalan dengan arus globalisasi, potret pendidikan Islam dewasa ini melahirkan dua sudut pandang yang berbeda (Fauzi, 2018), yaitu; a) pendidikan Islam tidak lagi dimonopoli oleh kelompok liberalis dan fundamentalis, melainkan telah diwarnai oleh sekelompok Islam lain, b) pendidikan Islam dipersepsikan menjadi embrio lahirnya kelompok Islam radikal dan Islam fundamentalis (Fauzi, 2018), sebagaimana hasil penelitian Farida menjelaskan bahwa lahirnya radikalisme dan fundamentalisme dilatarbelakangi oleh pemikiran dan peran sosial kiai, pandangan tersebut secara signifikan memberikan pengaruh terhadap lulusan pendidikan Islam, (Ummah Farida, 2016). Berangkat dari konteks tersebut, diperlukanlah paradigma pendidikan Islam yang lebih bumi dan humanistik, dengan melakukan kajian ulang terhadap sistem nilai sosial pesantren berdasarkan nilai al-Qur'an dan al-Hadits, sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan. Pesantren menjadi identitas tersendiri bagi lembaga pendidikan Islam Indonesia (Bali, 2017).

Fenomena saling serang dan merasa kelompok yang dianutnya paling benar adalah indikasi dari kegagalan pendidikan melahirkan manusia bermoral dan berbudi pekerti. Salah satu penilaian menyebutkan bahwa system

pendidikan nasional masih bersifat parsial, tidak utuh dan tidak sistematis. Implikasi dari system yang semacam ini menghasikan *out put* pendidikan yang memiliki karakteristik labil.

Mengutip pendapat Ngainun Naim, ada tiga kelompok besar *prototype out put* pendidikan dewasa ini. *Pertama*, pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual yang mampu menguasai terhadap teknologi, namun kurang mampu memahami, menjalankan dan menghayati nilai-nilai agama. *Kedua*, mereka yang memiliki kemampuan intelektual dan mampu menghayati terhadap nilai-nilai ajaran agama akan tetapi tidak mampu menguasai teknologi dan dinamika politik yang ada di dalamnya. *Ketiga*, kelompok yang memiliki kemampuan intelektual yang mampu menguasai agama akan tetapi tidak mampu menghayati nilai-nilai luhur sebagai substansi ajaran agama (Ngainun Naim, 2010). Adanya ketidakseimbangan antara pola pikir, penghayatan dan tingkah laku yang diperoleh selama masa belajar menjadikan *out put* pendidikan seperti di atas menjadi cacat pendidikan.

Tujuan Pendidikan Nasional

Merujuk pada pendapat Naquib Al-Attas, akar kata pendidikan mengambil pada istilah *ta'dzib* mempunyai pengertian bahwa pendidikan merupakan proses perwujudan manusia yang mempunyai adab. Dalam hal ini adab didefinisikan sebagai: (1) *The one who is sincerely conscious of his responsibilities towards and true God*, (2) *Who understands and fulfills his obligations to himself and others in his society with justice*, and (3) *who constantly strives to improve every aspect of himself towards perfections as a man of adab* (Al-Attas, 1999). Secara universal kesimpulan menyeluruh pengertian *ta'dib* adalah menjadikan manusia yang terus berusaha untuk mengembangkan kebaikan bagi dirinya sendiri, masyarakatnya secara adil dan bertanggungjawab terhadap aturan-aturan Tuhan.

Maka peran pendidikan sebagai agen perubahan adalah merubah orang yang kurang beradab menjadikan orang yang beradab atau merubah orang yang perilakunya tidak baik menjadi baik. Seorang ahli sosiologi Pierre Bourdieu mengatakan pendidikan adalah agen bagi reproduksi kultural (Piere Bourdieu). Artinya pendidikan berperan besar dalam memproduksi ulang dan terus menerus mendampingi kelas-kelas sosial yang ada di masyarakat. Di sekolah anak-anak yang datang berangkat dari keluarga yang memiliki kultur berbeda-beda dalam bentuk relasi/pergaulan sosial, bahasa dan tradisi, serta gaya hidup lainnya. Sehingga disinilah peran sekolah untuk membongkar

jurang pemisah antar kelas-kelas sosial yang berbeda melalui nilai-nilai akhlak di sekolah (Fauzi, 2015).

Padahal pemerintah sudah memberikan kebijakan system desentralisasi yang berlanjut pada system demokrasi kepada setiap daerah dan sekolah untuk mengolah dan mengembangkan sendiri potensi yang dimiliki daerah dan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pada era otonomi, kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah memiliki *political will* yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerah bersangkutan akan maju (Baharun, 2012).

Jika harapan masing-masing sekolah sudah tercapai menghasilkan *out put* pendidikan yang cakap di bidang industri maupun prestasi akademik lainnya. Karena itu, perlu digarisbawahi adalah *out put* pendidikan yang melahirkan manusia cakap dalam potensi kepribadian dan sosial. Karena masalah bangsa yang masih menjadi sorotan utama adalah *out put* pendidikan yang masih buram dalam membangun relasi sosial.

Tantangan Materi Pelajaran di Sekolah

Penanaman dan penghayatan sikap-sikap budi pekerti di sekolah sejauh ini masih bersifat formatif belum menjadikan nilai-nilai yang diharapkan dalam indikator pencapaian belajar terwujud secara permanen dalam diri peserta didik di sekolah, terlebih lagi tantangan ketika peserta didik sudah tidak berada di lingkungan sekolah. Ketika kasus potensi kepribadian dan sosial yang dipertanyakan, maka materi pelajaran di sekolah yang dianggap paling bertanggung jawab atas kegelisahan ini adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Secara teoritis PAI adalah proses pendidikan yang dilakukan pendidik untuk membekali anak didik dengan pengetahuan, pemahaman, penghayatan pengamalan ajaran agama Islam (Muchlis Sholichin, 2007).

Sedangkan PKn adalah pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga Negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik demokratis (Subhan Sofhayan). Kandungan moral dari kedua mata pelajaran di atas telah mencakup norma-norma hidup manusia yang berbudi pekerti, menghayati dan memahami agama dan Negara yang melindunginya serta memuat materi toleransi dalam bentuk mampu menghargai perbedaan di tengah-tengah lingkungan masyarakatnya. Secara teoritik, paradigma pendidikan Islam

dipahami sebagai bentuk pandangan yang menyeluruh terhadap konsep pendidikan Islam (Hamam Nasrudin, 2008), bercirikan khas Islam universal *kaffah* dengan dilandasi nilai-nilai *ilahiyyah* dan kemanusiaan (*insaniyyah*). Pandangan ini secara holistik diharapkan dapat menjadi landasan konseptual maupun operasional penyelenggaraan pendidikan Islam, sesuai dengan karakter kebangsaan dan mampu mengilhami tindakan sosial individu (Fauzi, 2015).

PAI dan PKn pada era Kurikulum 2013 ini memiliki porsi 3 jam pelajaran dalam sepekan, mengingat kurikulum sebelumnya mata pelajaran PAI hanya memiliki porsi waktu dua jam pelajaran. Maka dalam hal ini harapannya *out put* pendidikan memiliki nilai kepribadian yang unggul secara pribadi dan sosial yang tidak cukup hanya diketahui dan dipahami, tetapi juga dirasakan serta dijadikan sebuah aksi dalam kehidupan anak didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Proses pembelajaran harus dapat menjadi wahana untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat berinteraksi secara ekstensif dengan masyarakat, mengembangkan sikap dan perilaku demokratis, serta menumbuhkan produktivitas kegiatan belajar peserta didik (Mushfi & Iq, 2017). Pada kurikulum 2013 PAI ditambahi dengan penekanan istilah (*Budi Pekerti*) menjadi PAI dan BP. Sedangkan PKn mengalami banyak perubahan muatan, di era orde lama dikenal dengan pendidikan *civic*. Kemudian pada masa orde baru pendidikan kewarganegaraan sangat insentif dilakukan dengan berbagai bentuk penerapan, seperti Pendidikan Moral dan Pancasila (PMP) dan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Lalu materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan pada masa demokrasi berorientasi pada penyiapan peserta didik menjadi warga yang toleran, kritis, aktif dan mandiri.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kompetensi: (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, (2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi, (3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa yang lainnya. (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Abdul Ghofur, 2007). Pendidikan moral ada pada materi ajar PAI misalnya berisi materi pokok meneladani sifat Rosulullah, hidup hemat dan

sederhana, menghindari judi dan pertengkaran. Sedangkan materi pada PKn diantaranya adalah pendidikan politik atau mengenai ketatanegaraan yang berlandaskan Pancasila guna merajut manusia dalam masyarakat yang bersatu dalam kebhinnekaan (Ahmad, 2017).

Persiapan, Pelaksanaan dan Evaluasi PAI dan PKn di Sekolah

Pada tahap persiapan yang telah tersusun dalam perangkat pembelajaran SKL (Standard Kompetensi Lulusan) ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud No. 54 Tahun 2013, kemudian menjadi turunan standar isi, kompetensi inti dan materi. Dalam rumusan Kompetensi Inti (KI) pada mata pelajaran PAI dan PKn kurikulum 2013 disebutkan sebagaimana berikut:

KI 1	Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2	Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3	Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI 4	Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat,) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

Dari tabel di atas pada KI 1 merujuk pada pencapaian kompetensi spiritual. Pada KI 2 mencakup aspek sosial. Pada KI 3 mencakup pengembangan kognitif dan pada KI 4 mengarah pada pengembangan implementatif. Sebagaimana yang ditulis di buku ajar, pada kurikulum 2013 tidak lagi menekankan istilah SK (Standar Kompetensi) melainkan menggunakan KI

(Kompetensi Inti). Hal ini yang diharapkan pada pendidikan adalah tercapainya system pembelajaran yang dinamis, tidak menciptakan manusia *robotic* yang hanya patuh dengan aturan-aturan belajar yang kaku.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan pembelajaran, pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. Dalam hal ini dapat dipaparkan bahwa proses pelaksanaan pembelajaran PAI dan PKn di sekolah sudah menekankan pada kegiatan *active learning*, di mana peserta didik dapat mengeksplor wawasan dan pengetahuannya sendiri melalui sumber belajar yang tidak terbatas.

Guru merupakan ujung tombak dari kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang menjadi motivator bagi peserta didik dalam memacu aktivitas belajarnya (Baharun, 2017b). Dalam proses pembelajaran kurikulum 2013, saat ini lebih banyak memberikan ruang pada peserta didik untuk mengeksplor secara bebas pengetahuan yang diperoleh, bahkan ada rambu-rambu "guru haram menerangkan". Pendidik bertindak sebagai fasilitator dan pendamping dalam kegiatan pembelajaran untuk mengantarkan peserta didik mencapai tujuan serta menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif (Bali, 2015). Dari perspektif ini sebenarnya peserta didik tidak hanya butuh sosok guru yang berwawasan luas dan kreatif dalam memonitoring proses pembelajaran, melainkan juga sangat membutuhkan sosok panutan yang memiliki nilai-nilai moral budi luhur sebagai teladan peserta didik. Maka sangat dibutuhkan peran guru yang bisa memberikan teladan moral yang disengaja maupun tidak disengaja melalui kurikulum laten.

Pada tahap evaluasi ini, merupakan salah satu komponen pembelajaran yang memiliki peranan penting, dimana tolak ukur keberhasilan siswa selama melakukan proses pembelajaran dapat diketahui melalui evaluasi penilaian. Definisi evaluasi menurut Nana Sujana adalah proses untuk menentukan atau memberikan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu (Nana Sujana, 1990). Evaluasi meliputi semua aspek penilaian pembelajaran pada ranah kemampuan berpikir (kognitif), kemampuan rasa, sikap atau perilaku (afektif) serta kemampuan keterampilan (psikomotorik). Evaluasi pada aspek kognitif diperoleh melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengetahui, memahami, mensintesis, menganalisis materi pembelajaran di kelas. Sedangkan evaluasi pada aspek afektif diukur dari kemampuan menerima, berpartisipasi, menilai, mengorganisasi, serta membentuk pola hidup. Selanjutnya aspek

psikomotorik menyangkut kemampuan melakukan persepsi, melakukan gerakan yang kompleks, melakukan penyesuaian pola gerakan dan mengembangkan kreativitas. Bentuk evaluasi yang diberikan kepada peserta didik seyogyanya mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik secara seimbang (Bali, 2013). Desain kurikulum dari pemerintah secara dokumen sudah sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan bangsa untuk masyarakatnya. Dalam hal ini kurikulum 2013 menekankan penilaian utama mengarah pada aspek afektif yang kemudian terlihat dalam aspek psikomotorik lalu kemudian penilaian dilakukan pada ranah kognitif. Hanya saja praktek di kelas khususnya pada tahap evaluasi kurang memberikan gerak maksimal dan optimal mengingat jumlah jam dan materi yang harus dipelajari menyita banyak waktu. Selain itu keterampilan pendidik sangat dibutuhkan dalam melakukan penilaian yang bersifat sporadis. (Mundiri, 2014)

Pada tahap evaluasi penilaian dilakukan dengan memberikan skor pada kegiatan diskusi, pengayaan (pendalaman materi), refleksi akhlak mulia, ulangan dalam bentuk soal uraian dan pilihan ganda serta mencatat sikap-sikap karakter selama proses pembelajaran. Namun, perlu juga menekankan bahwa penilaian juga berdasarkan sikap dan keterampilan sehari-hari selama dalam masa pengamatan guru.

Rekonstruksi Evaluasi Pendidikan Moral

Untuk mewujudkan harmoni sosial yang diharapkan PAI dan PKn sangat menentukan bagaimana isi materi bisa diajarkan dengan baik melalui tahap perencanaan pembelajaran hingga tahap evaluasi pada peserta didik di sekolah. Lebih dari itu unsur evaluasi yang dianggap paling menentukan seberapa berhasilkah tujuan itu tercapai perlu melihat kembali dan menata kembali suasana belajar sekolah dengan mempertimbangkan keberadaan peserta didik itu sendiri dari segi lingkungan ia tinggal dan melangsungkan kehidupan (Muali, 2016). Sebab, acuan kurikulum pemerintah yang berlaku secara umum tidak bisa memastikan keadaan pada tiap-tiap institusi pendidikan. Praktisi pendidikan termasuk pimpinan sekolah dan guru perlu merumuskan ulang model evaluasi pendidikan moral yang tidak sekedar berdasarkan hasil nilai ulangan harian. Misalnya selama ini sekolah lebih banyak menekankan hafalan, dan ketepatan dalam menjawab soal pilihan ganda. Karena penilaian dari system seperti itu jelas bukan tolak ukur keberhasilan peserta didik pada mata pelajaran moral dan pancasila. Perlu ada

penekanan-penekanan evaluasi yang sifatnya perilaku moral yang berbudi luhur tumbuh dan mengakar pada kepribadian peserta didik sebagai hasil belajar. Landasan tercapainya suatu tujuan pendidikan yang baik adalah melalui implementasi kurikulum yang sesuai dengan kemampuan sekolah dalam mengelolah sumber daya yang dimiliki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan *stakeholder*. Banks menuliskan bahwa sekolah sebagai sistem sosial mengajarkan dan membentuk kepribadian dan karakter siswa melalui kurikulum yang manifes maupun laten (Banks, 2010).

Inovasi kurikulum manifes yang telah banyak melakukan perubahan dari pemerintah sepertinya tidak begitu memperlihatkan dampak yang optimal terhadap keberhasilan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari *out put* pendidikan yang dianggap sebagai produk gagal dari sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan melalui kurikulum laten pihak sekolah dapat lebih leluasa untuk mengkonstruksi kurikulum guna menopang dari kekurangan yang ada di dalam kurikulum manifes. Kurikulum laten menurut Raihan seringkali lebih berpengaruh daripada yang manifes karena dapat mengomunikasikan pada siswa tentang sikap-sikap “sekolah terhadap berbagai persoalan, termasuk bagaimana sekolah memandang mereka sebagai manusia, laki-laki, perempuan, siswa-siswa luar biasa, siswa-siswa dari beragam kelompok agama, budaya, ras, dan etnis”. Untuk mencapai idealitas di atas, maka harus dirumuskan sistem evaluasi yang tidak cukup menilai pada tataran kognitif dalam bentuk penilaian dari ulangan. Lebih dari itu aspek afektif dan psikomotorik yang sejauh ini belum tersentuh secara mendalam dalam bentuk penilaian aksi moral yang dilakukan oleh peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Fokus pada tahapan evaluasi pembelajaran ini khususnya pada mata pelajaran PAI dan PKn perlu direkonstruksi guna memberi implikasi jangka panjang dan permanen pada peserta didik melalui: a) Rekonstruksi pertama harus dimulai dari kemampuan pendidik dalam membawa materi ajar pendidikan moral kepada peserta didik harus kompeten di bidangnya dan bisa mengintegrasikan dengan kasus-kasus yang banyak terjadi di lingkungan kehidupan, b) Sesekali peserta didik di hadapkan dengan permasalahan yang marak terjadi untuk menemukan penyebab dan solusinya. Isu-isu yang diberikan harus sesuai dengan daya kemampuan peserta didik. Kemudian pendidik sebagai fasilitator mengoreksi hasil kerja peserta didik dan memberikan ulasan dengan membawa sudut pandang kebersatuan kebhinnekaan, c) Pendidik tidak terpaku pada *instrument* penilaian formalitas

tapi lebih luas cakupannya, d) Pendidik menyisipkan pembelajaran *multicultural* melalui kurikulum laten secara *sporadic*, e) Evaluasi tulis berupa ulangan harian bukan penilaian utama atas keberhasilan belajar peserta didik. Penilaian lebih ditekankan pada ranah afektif yang berimplikasi pada penilaian psikomotorik peserta didik.

Output Pendidikan yang Didambakan Menuju Masyarakat Ideal

Esesensi pendidikan moral bukan mengajarkan tentang akademik maupun non akademik lebih dari itu adalah usaha sadar untuk menyiapkan manusia seutuhnya menjadi manusia yang berwatak luhur dalam segenap peranannya di masa sekarang dan akan datang. Upaya pemberian pendidikan moral menurut Teuku Ramli dapat dilakukan dengan lima pendekatan, yaitu: Penanaman nilai (*inculcation approach*), perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*), analisis nilai (*values clarification approach*), pembelajaran berbuat (*action learning approach*) (Teuku Ramli Zakaria, 2011).

Jika disintesis antara mata pelajaran PAI dan PKn akan menjadi sebuah objek kajian pembelajaran moral yang membentuk kepribadian pesera didik yang bisa menjamin kebersatuan kebhinnekaan dengan memiliki sikap sebagai berikut: 1) Taat pada ajaran agama yang dianutnya serta tidak mudah terprovokasi oleh kelompok lain, 2) mengikuti teladan nabi Muhammad; melalui peristiwa hijrahnya ke Madinah, peserta didik dapat meneladani kisah Nabi Muhammad SAW yang mempersaudarakan kaum anshor dan kaum muhajirin dan menciptakan perdamaian antara kaum muslim dan kaum non muslim melalui piagam Madinah. Sehingga menumbuhkan sikap toleransi, 3) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (*toleransi, gotong royong*), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, 4) Menghargai hidup dalam perbedaan di lingkungan jangkauan pergaulan dan keberadaannya, 5) Mempunyai semangat belajar untuk mengetahui berbagai wawasan keilmuan dan pemahaman tentang fenomena dan kejadian yang nampak di sekitar lingkungan, sehingga bisa berpikir dan bersikap bijak ketika dihadapkan dengan gesekan perbedaan dan perpecahan antar golongan, 6) Mampu menalar dan mengurai secara mandiri berbagai aspek permasalahan di sekitar lingkungan hidupnya secara objektif, 7) Mempunyai wawasan pendidikan politik; tentang ketatanegaraan sehingga dapat menempatkan diri sebagai bagian dari warga negara, 8) Tumbuhnya semangat nasionalisme yang turut serta menjunjung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fauzi, 2017).

Kesimpulan

Tantangan moral yang menjadi permasalahan identitas bangsa menjadi tanggungjawab semua elemen masyarakat, khususnya pendidikan yang memiliki peran signifikan dalam membentuk dan melahirkan generasi bangsa yang unggul secara intelektual dan moralitas. Sehingga evaluasi pendidikan perlu kiranya melakukan perbaikan secara terus menerus dan serius dalam memenuhi kebutuhan kegelisahan moral generasi bangsa. Dan melalui pendidikan moral di sekolah khususnya yang tercakup dalam materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ditambah lagi dengan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang secara jelas bertanggungjawab atas penanaman nilai-nilai moral bagi warga Indonesia. Sehingga menumbuhkan sikap toleransi, 3) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, 4) Menghargai hidup dalam perbedaan dilingkungan jangkauan pergaulan dan keberdaannya, 5) Mempunyai semangat belajar untuk mengetahui berbagai wawasan keilmuan dan pemahaman tentang fenomena dan kejadian yang namapak di sekitar lingkungan, sehingga bisa berpikir dan bersikap bijak ketika dihadapkan dengan gesekan perbedaan dan perpecahan antar golongan, 6) Mampu menalar dan mengurai secara mandiri berbagai aspek permasalahan disekitar lingkungan hidupnya secara objektif, 7) Mempunyai wawasan pendidikan politik; tentang ketatanegaraan sehingga dapat menempatkan diri sebagai bagian dari warga Negara, 8) Tumbuhnya semangat nasionalisme yang turut serta menjunjung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2017). Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal Dalam Praktik Sosial di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur. *Proceedings Ancoms 1St Annual Conference For Muslim Scholars*, (110), 715-725.
- Baharun, H. (2012). Desentralisasi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Islam. *Jurnal At-Tajdid*, 1(2).
- Baharun, H. (2017a). *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan dan Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum PAI)*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
- Baharun, H. (2017b). Peningkatan Kompetensi Guru melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madrasah. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 6(1), 1-25.
- Bali, M. M. E. I. (2013). Analisis Buku Teks BSE Karangan I.S. Sadiman dan Shendy Amalia Mata Pelajaran IPS Kelas 4 SD di Gugus VI Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. *Jurnal KSDP FIP UM*, (4).
- Bali, M. M. E. I. (2015). Penerapan Model Pembelajaran Fan N Pick dan Two Stay Two Stray Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial dan Hasil Belajar IPS Siswa. *Jurnal Manajemen FE UM*.
- Bali, M. M. E. I. (2017). Perguruan Tinggi Islam Berbasis Pondok Pesantren. *Al-Tanzim*, 1(2), 1-14.
- Fauzi, A. (2015). Membangun Epistemologi Pendidikan Islam Melalui Kepemimpinan Spiritual: Suatu Telaah Diskursif. *Empirisma STAIN Kediri*, 24(2), 155-167.
- Fauzi, A. (2017a). Manajemen Pendidikan Islam di Pesantren; Berbasis Kearifan Lokal Kajian Fenomenologis. In *Seminar Nasional Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Sinergitas Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Penguatan Pendidikan Karakter* (pp. 51-62). Malang.
- Fauzi, A. (2017b). Persepsi barakah di pondok pesantren zainul hasan genggong perspektif interaksionalisme simbolik. *Al-Tahrir*, 17(1), 105-132.
- Fauzi, A. (2018a). Konstruksi Pendidikan Pesantren; Diskursus Terhadap Fundamentalisme dan Liberalisme dalam Islam. *Al-Tahrir IAIN Ponorogo, Vol.18*(Islam: Liberalism & Fundamentalism), 89-114.

- Fauzi, A. (2018b). Transkulturasi Social Capital Pesantren; Sebagai Paradigma Pendidikan Islam Moderat. In *2St Annual Conference For Muslim Scholars, Strengthening The Moderate Vision of Indonesia Islam* (Vol. II, pp. 751-765). Surabaya.
- Mundiri, A. (2014). Rekonstruksi Epistemologi Pendidikan Islam Berbasis Spirit Integralistik. *At-Turas*, 1(1), 23-51.
- Mundiri, A., & Zahra, I. (2017). Corak Representasi Identitas Ustadz dalam Proses Transmisi Pendidikan Karakter di Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No, 21-35.
- Mushfi, M., & Iq, E. (2017). Model Interaksi Sosial Dalam Mengelaborasi Keterampilan Sosial. *Jurnal Pedagogik*, 4(2), 211-227.
- Ghofur, Abdul. *Evaluasi Penilaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. 2007. Jogjakarta: Insani Press
- Hamam Nasrudin, *Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam, Tinjauan Filosofis atas Pemikiran Abdurrahman Mas'ud*, Semarang: IAIN Walisongo 2008.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. 2012. Jakarta: Democracy Project.
- Muali, C. (2016). Konstruksi Strategi Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences sebagai Upaya Pemecahan Masalah Belajar. *Pedagogik; Jurnal Pendidikan*, 1-11.
- Naim, Ngainun. *Rekonstruksi Pendidikan Nasional*. 2010. Yogyakarta: Teras Pers.
- Raihani. *Pendidikan Islam dalam Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sholichin, M. Muchlis. *Pengembangan evaluasi pai berbasis ranah afektif*. 2007 *Jurnal. Tadris Volume 2 Nomor 1*.
- Sujana, Nana. *Penilaian hasil Proses Belajar*. 1990. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Ummah Farida, *Radikalisme, Moderatisme dan Liberalisme Pesantren*, (Edukasia, *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 02, No. 1, Februari 2016), 145., lihat juga Abd Muin, *Pendidikan Pesantren dan Potensi Radikalisme*, Jakarta: Prasasti, 2007.
- Zakaria, Teuku Ramli. *Pendekatan Penilaian Nilai*. 2011. *Jurnal Depdiknas*.